

PELAKSANAAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Safitri Handayani¹, Juliyati Saleh², Adnan Ma'ruf³

¹) Mahasiswa, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²) Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³) Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of inspectorate functions in the supervision of the Regional Government in Makassar. The type of research was qualitative directly to the object of research in this study collected with primary data and secondary data. The study used phenomenological type. Technique of collecting data used instrument in the form of observation, interview and documentation. The results of the research indicated that: (1) Government policy assessed and checked the extent of policy deviation in Implementation of activities undertaken by Inspectorate of Makassar city. (2) With the supervision of the government can tested directly the problems that occur. (3) Implementation of investigation required cooperation with the government so that information received in conducting the examination can be the object of supervision.

Keywords: *Implementation, Inspectorate Function, and Supervision.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar. Jenis penelitian adalah kualitatif langsung ke objek penelitian dalam penelitian ini dikumpul dengan data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan tipe fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan Pemerintah menilai dan periksa sejauh mana kebijakan Penyimpangan dalam Pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh Inspektorat kota Makassar. (2) Dengan di lakukan pengawasan pemerintah dapat menguji secara langsung permasalahan yang terjadi. (3) Pelaksanaan penyelidikan dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah sehingga informasi yang diterima dalam melakukan pemeriksaan dapat dijadikan obyek pengawasan.

Kata Kunci : Pelaksanaan , Fungsi Inspektorat , dan Pengawasan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka terciptanya *good goverment* dan *clean governance* maka, meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaran pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Victor (2011:16) Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik alasannya karena faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan petunjuk yang akan

dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan.

Namaun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Manullang (2006:13) Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui.

Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.

Dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kota Makassar No.VII Tahun 2005 tentang

pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat kota Makassar, maka penamaan untuk Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) berubah menjadi Inspektorat.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Peraturan Walikota Makassar nomor 15 tahun 2014 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada inspektorat kota Makassar.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi bahwa inspektorat kota makassar kembali menggelar pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan

inspektorat menemukan masalah pengelolaan keuangan dan masalah administrasi pada unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah lingkup pemkot makassar.

Pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan pemerintahan daerah, khususnya di Kota Makassar.

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektifitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan

sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya, apabila sesuatu program kelembgaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya.

Siagian (2011:176) mengemukakan bahwa: pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Situmorang (Makmur 2011:175) mengemukakan bahwa: pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Suryanty Fabanyo (2010 : 94) menyatakan bahwa: Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Sule dan Saefullah (2005 : 15) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah : a) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. b) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. c) Mencegah, terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan d) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan

Siswandi (2009 : 200) Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukanya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya.

Melalui fungsi pengawasan menejer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

Siswandi (2009 :200) mengemukakan bahwa : (a) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku (b) Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi (c) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi (d) Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi (e) Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan kemudian mencari solusi yang tepat.

Syakrani (2008:57) menyebutkan banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya *good governance*. Faktor-faktor tersebut dapat menunjang terwujudnya *good governance* tapi ada juga yang

menghambat terwujudnya *good governance*.

Faktor-faktor tersebut antara lain: Faktor Pendukung yaitu; (a) Aparat pemerintah yang bersih, bermoral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta *check and balance*.

(b) Amandemen UUD 1995 sebagai contoh pada pasal 28F, yang mengatur kewajiban pemerintahan untuk memberikan informasi (penunjang prinsip *good governance* yaitu transparansi). Sedangkan Faktor Penghambat (a)Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai *good governance* sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka.

(b) Kualitas SDM untuk mewujudkan *good governance* yang kurang.

Menurut Makmur (2011:186) yaitu Pengawasan fungsional. Kelembagaan atau organisasi apa pun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan Negara dengan aktifitas yang begitu

rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus dibidang pengawasan.

Pengawasan masyarakat.
Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama pengguna sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama Negara.

Pengawasan administratif.
Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas bagi seluruh kelembagaan agar tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang kita istilahkan pengawasan administratif.

Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.

Pengawasan teknis.Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan

atau organisasi yang berkaitan dengan administratif, sesungguhnya tidak kala pentingnya adalah kegiatan teknis karena jenis pekerjaan dibidang perikanan, pekerjaan, industri dan lain sebagainya.

Pengawasan pimpinan. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri.

Pengawasan barang.
Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.

Pengawasan jasa. Jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa

dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu untuk memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.

Pengawasan internal. Apabila kita melihat bahwa kelembagaan itu memiliki jangkauan yang luas dan terbentuk sub-sub kelembagaan di dalamnya, misalnya kelembagaan negara yang memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, legislatif, auditif dan semacamnya.

Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas.

Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

Pengawasan eksternal. sejalan dengan argumenatsi yang kita kemukakan pada poin kedelapan

tersebut di atas, maka kebalikan pengawasan internal tersebut dengan pengaawasan eksternal, yaitu pengawasan yang di lakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar kelembagaan tertentu, misalnya di negara indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK).

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua bulan) dari tanggal 14 Juni sampai 1 Agustus yang berlokasi di Kota Makassar. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan adanya bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi penyelewengan terhadap Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar yang belum terlaksana dengan baik.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Kota Makassar. Penelitian menggunakan tipe fenomenologi. Sumber data

adalah data primer dan data sekunder. Informan penelitian yaitu sekretaris inspektorat, kepala bidang pemerintahan dan anggota pemerintahan.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data yaitu dengan teknik triangulasi. Teknik analisa data yaitu pengumpulan informasi melalui wawancara, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi pengawasan sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Sistem organisasi akan timpang apabila fungsi pengawasan dalam organisasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Begitu pula yang terjadi pada lingkungan pemerintah daerah kota makassar. Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pada Kantor Inspektorat, Kota Makassar.

Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.

Pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat di Kota Makassar, maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan.

Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor Inspektorat daerah kota Makassar ditekankan pada pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan.

Dalam melakukan pemeriksaan oleh kantor Inspektorat kota makassar, maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan Apratur pemerintah daerah, alasan dilakukan pemeriksa adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh

inspektorat tersebut, dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan khususnya di Kota Makassar.

Pelaksanaan fungsi inspektorat dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan maksimal, ini tidak terlepas dari proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat, akan tetapi masih terdapat indikasi-indikasi yang masih belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan pemerintahan seperti masih terjadi ketidak disiplin pegawai, artinya pengawasan yang dilakukan pihak inspektorat sebagaimana hal diatas tidak efektif.

Melakukan pemeriksaan masih belum efektif, penyebab dari kurang efektifnya pemeriksaan ialah dimana tenaga pemeriksa belum menetapkan bidang penyimpangan, persoalan ini membuat permasalahan-permasalahan terus terjadi.

Kelancaran pelaksanaan pemeriksaan guna menunjang kegiatan pengawasan adalah perlu

pemeriksaan obyektif pelaksanaan pemeriksaan dari masing-masing bidang pengawasan dan mudah dipahami. Oleh karena itulah dibutuhkan tenaga pemeriksa yang berkompeten yang sesuai pada tempat di bidangnya.

Pemeriksaan dalam bidang pembangunan sudah terkoordinasi dengan baik karena sudah menetapkan bidang-bidang penyimpangan.

Faktor yang menyebabkan bidang pembangunan pelaksanaan pemeriksaan dalam pengawasan dikantor inspektorat kota makassar adalah kurangnya koordinasi terhadap tenaga pemeriksa dan masih lambat melakukan tugas dan wewenangnya.

Objek pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar yaitu terdiri dari 54 SKPD yang berada di wilayah lingkup Pemerintah Kota Makassar, Perusahaan Daerah (PD) yang terdiri atas: PD. Makassar Raya, PD. Parkir, Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan daerah air minum (PDAM) dan Terminal yang berada di

wilayah Kota Makassar dengan sistem pemeriksaan yakni pemeriksaan dilakukan setiap bulan. Untuk tahun 2016 dilakukan sistem pemeriksaan triwulan yakni setiap 3 bulan dilakukan pemeriksaan, dan dalam satu tahun dilakukan 4 kali pemeriksaan dalam satu SKPD berdasarkan PKPT.

Pelaksanaan pemeriksaan belum terlaksana dengan baik sehingga dibutuhkan adanya kerjasama dengan aparat pemerintah dan dibutuhkan tenaga pemeriksa yang bersih, jujur serta bertanggung jawab sehingga dapat dengan mudah untuk mengetahui adanya penyimpangan dan penyelewengan yang di temukan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan harus setiap 2 minggu sepekan di lapangan sehingga oknum-oknum yang sering melakukan penyimpangan dan penyelewengan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.

Kasus yang ditangani selama melakukan pemeriksaan dilapangan pada tahun 2015 mencapai 51 kasus, sedangkan tahun 2016 mencapai 48 kasus, dan tahun 2017 mencapai 44

kasus. Kasus yang sering ditemukan di kota makassar adalah Dinas Pendidikan dan Kecamatan Tamalate. Pengaduan Dinas Pendidikan mengenai pemeriksaan keuangan yang belum efektif ditemukan adanya pungli sehingga diberikan surat teguran dari pemerintah Kota Makassar apabila diulangi kembali maka akan di berikan sanksi atau dipecat sedangkan kecamatan Tamalate pengaduannya mengenai pelayanan publik dan kebersihan yang mencapai 44 laporan.

Kelengkapan fasilitas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dapat berpengaruh dengan kinerja inspektorat, masalah fasilitas bisa menjadi faktor terhambatnya kinerja inspektorat saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat di kantor Inspektorat Kota Makassar 90% sudah memadai dan menunjang aktivitas pengawasan dan pemeriksaan.

Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan hubungannya dengan fungsi pengawsan yang

dijalankan oleh kantor Inspektorat Darerah Kota Makassar, maka penilaian selanjutnya dalam melakukan efektivitas pengujian dalam menerapkan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Mkassar.

Hasil peneliti dengan sekretaris Inspektorat dalam melakukan pengujian telah koordinasi dengan pihak yang terkait atas apa yang telah terjadi dari penemuan-penemuan dari pemeriksaan selama ini berjalan dengan baik. Pada dasarnya kerjasama yang baik dengan orang lain dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan proses kerja dalam sebuah organisasi/ lembaga .Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, baik pekerjaan fisik maupun kerjasama dalam pemberian informasi akan memberikan nilai lebih. Dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak memakan waktu yang cukup lama.

Selama ini pengujian terkait dengan peroalan-persoalan yang telah ditemukan setelah pemeriksaan tidak melibatkan langsung untuk melakukan proses pengujian dengan

pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengawasan pemerintahan.

Melakukan proses pengujian ada beberapa persoalan yang telah dilakukan pengujian tidak ekspose ke media atau kemasyarakat sehingga sebagian masyarakat berpikir bahwa proses pengujian yang di lakukan tertutup.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengujian adalah data yang tidak akurat, dimana salah satu faktor yang menyebabkan ketidakakuratan data yang diperoleh di sebabkan kurang siapnya pihak penyelenggara pemerintah didalam melengkapi data yang di inginkan pihak inspektorat sehingga dibutuhkan waktu lagi untuk menunggu data tersebut untuk dilengkapinya.

Dalam melakukan pengujian dengan sejumlah informasi yang di terima tidak sesuai dengan bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan karena adanya keterbatasan sejumlah informasi yang ada di lapangan dan selain itu belum

adanya koordinasi yang terlibat langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para pihak sekolah dalam hal ini program pendidikan gratis.

Aturan dan regulasi yang menjadi landasan pihak inspektorat dalam melakukan pengujian atas temuan dari pemeriksaan terhadap pengawasan pemerintahan di kota makassar. Sebagai bawahan arahan atau kebijakan dari pimpinan dapat mempengaruhi proses pengujian yang akan di lakukan.

Selaku tenaga pemeriksa tidak serta merta mengambil kebijakan sendiri harus sesuai dengan keputusan pimpinan dan apabila kasus yang sangat sulit perlu diberikan surat teguran dan melapor ke walikota makassar agar laporan yang masuk dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengujian sehingga data tersebut dapat dijadikan informasi secara akurat.

Tujuan yang dilakukan dalam melakukan pengusutan adalah untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan atas penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan atau informasi dari berbagai pihak.

Terkait penjelasan di atas peneliti menggambarkan bawa pengawasan yang di lakukan oleh inspektorat pengusutan persoalan tidak efektif, di mana hanya sekali setahun melakukan pengawasan langsung ke pemerintahan padahal sebuah program yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak harus dilakukan sebuah pengawasan dan pengusutan yang kontinyu seperti melakukan pengawasan langsung setiap bulan sekali, semua ini untuk terciptanya sebuah program yang tepat pada sasarannya. Kemudian dilihat dari hasil pemeriksaan mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan pengawasan maka akan disajikan.

Sebagaimana telah dilakukan ternyata dalam pelaksanaan penyelidikan belum tepat waktu. Hal ini disebabkan karena lambatnya informasi yang diterima dalam melakukan pemeriksaan dan

pengujian dari setiap data yang dijadikan obyek pengawasan.

Melakukan penyelidikan nampak belum tepat, alasannya karena dalam melakukan penyelidikan tenaga penyidik khususnya pada Kantor Inspektorat di Kota Makassar nampak belum didasari berdasarkan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi. Kemudian pelaksanaan penyelidikan khususnya pada Kantor Inspektorat yang selama ini belum dilakukan secara tepat/efektif.

Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan penyelidikan belum terpusat dalam bidang-bidang penyimpangan yang terjadi dan selain itu pelaksanaan penyelidikan belum dilakukan secara tepat waktu.

Pengawasan Inspektorat belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan karena pengalaman organisasinya masih minim, seharusnya sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pembinaan dan

pengawasan harus punya pengalaman organisasi. Tanpa suatu organisasi maka suatu pekerjaan tidak berjalan lancar. “organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan”.

Inspektorat belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan karena pengalaman organisasinya masih minim, seharusnya sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan harus punya pengalaman organisasi. Tanpa suatu organisasi maka suatu pekerjaan tidak berjalan lancar. “organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan”.

Pelaksanaan pengusutan dilakukan dengan cara penyelidikan agar kasus tersebut dapat dengan mudah ditemukan. Kasus yang ditangani oleh tenaga pemeriksa yaitu kasus berat dan ringan. Kasus berat contoh korupsi atau pembunuhan berencana biasanya di vonis 5-7 tahun penjara tergantung kasus yang ditangani sedangkan kasus ringan

contonya sering terlambat masuk kantor atau tidak mengikutu rapat selama kegiatan berlangsung. Kasus berat dilakukan 4 kali pemeriksaan dan apabila terbukti bersalah maka di laporkan di walikota makassar agar di tindak lanjuti sedangkan kasus ringan dapat kami atasi dan akan diberikan surat teguran.

Dalam kegiatan penelitian ini,terdapat beberapa faktor yang berpangaruh dalam pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah kota makassar, faktor -faktor tersebut terbagi kedalam dua kelompok yaitu : faktor Pendukung dan faktor penghambat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa Partisipasi yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa sangat baik karena langsung berinteraksi kepada masyarakat mengenai pengaduan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan dapat secara langsung berprtisipasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan,

tetapi kurangnya interaksi kepada warga sehingga respon terhadap masyarakat kurang baik. Oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan maka masyarakat harus ikut berpartisipasi dimana dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan serta memberikan ide-ide atau gagasan, menyumbang tenaga, uang dan barang.

Transparansi merupakan pemerintahan yang baik akan bersifat transparansi terhadap rakyatnya dan dapat juga mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah.

Anggaran dilakukan secara terbuka (tranparansi) sehingga semua kegiatan dapat diketahui. APBD ini dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan jadi APBD dikerjakan pada saat masuk tahun baru. Jadi anggaran secara terbuka dapat menunjang setiap pelaksanaan kegiatan dan memberikan kemudahan dalam melakukan perencanaan dalam setiap kegiatan.

Anggaran APBD ini di lakukan tentunya secara terbuka sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat mempelancar atau mempermudah kegiatan salah satunya adalah sarana dan prasarana yang sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan dapat mendukung aktifitas pekerjaan di Kantor Inspektorat tersebut.

Sebagai aparatur pemerintah harus profesional sekaligus taat hukum memiliki integritas tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa aparatur pemerintah dalam menangani setiap pekerjaan yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan memiliki rasa tanggung jawab dalam penyelenggaraan pekerjaan di bidang pengawasan.

Aparatur pemerintah sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tetapi pada kenyataannya aparat pemerintah perlu melaksanakan pemeriksaan secara

ketat dan diteil karena masih banyak yang melakukan bidang-bidang penyimpangan dan penyelewengan yang tidak kita ketahui. Sehingga banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah memberikan resah kepada seluruh masyarakat.

Secara umum bahwa tingkat kinerja para karyawan baik karyawan swasta maupun karyawan aparat pemerintah dimana mereka bekerja secara kuantitatif maupun kualitatif di pengaruhi oleh bermacam-macam faktor.

Pencapaian suatu kinerja yang maksimal tentunya ada faktor yang melatarbelakangi, mengapa ada aparat yang bekerja rendah/buruk dan ada yang bekerja baik. Pemahaman ini penting untuk mengantisipasi perkembangan sumber daya manusia aparat di kantor inspektorat kota makassar sehingga dapat dengan mudah mengklasifikasi faktor-faktor yang perlu diperbaiki.

Hasil peneliti menemukan fakta bawa pegawai di kantor inspektorat telah mahir mengoperasikan alat elektronik seperti laptop, penggunaan

alamat web dan lain-lainnya. Atas dasar tersebut peneliti dapat menyimpulkan sumber daya manusia yang dimiliki kantor inspektorat dapat di golongkan dalam katagori baik.

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pihak Inspektorat kurang maksimal sehingga untuk pengawasan kurang efektif. Jika pihak Inspektorat beralasan bahwa terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya, itu sangat tidak rasional karena memang terbatasnya sumber daya manusia yang dimilikinya fungsi pengawasan dimiliki inspektorat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara sadar bahwa pencapaian suatu kinerja yang maksimal tentunya ada faktor yang melatarbelakangi, mengapa ada aparat yang bekerja rendah/buruk dan ada yang bekerja baik. Pemahaman ini penting untuk mengantisipasi perkembangan sumber daya manusia aparatur di kantor inspektorat kota makassar sehingga dapat dengan mudah mengklasifikasi faktor-faktor yang perlu diperbaiki.

Disini peneliti mengambil kesimpulan bahwa pihak inspektorat tidak punya manajemen yang bagus, jika manajemen bagus, maka semua terimplementasi dengan baik. “manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal, baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Selanjutnya efektivitas dalam penyelidikan terlihat belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan penyelidikan dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dampaknya tidak korektif dalam melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah

daerah tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut: pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyusutan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidak tepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan oleh aparatur pemerintahan di Kantor Inspektorat Kota Makassar.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi inspektorat terhadap pengawasan Pemerintah Daerah di Kota Makassar adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya Partisipasi dan Transparansi yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat di Kota Makassar.

Perlunya diterapkan fungsi perencanaan program pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengawasan pemerintahan daerah.

Terselenggaranya aparatur pengawas yang bersih dan memiliki rasa tanggungjawab dalam menangani setiap pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemeriksaan daerah di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusmawaty, 2014. *Pengawasan Inspektorat Terhadap Tupoksi Camat di kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Ilmu pemerintahan.
- Makmur, 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Edisi pertama. Cetakan pertama. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Manullang 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketujuh : penerbit : Jakarta. Ghalla Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang *Pedoman*

*Pembinaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.*

- Sarwoto, 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, P. Sondang, 2011. *Pengantar Manajemen*. edisi pertama. Cetakan pertama. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswandi, dan indra Iman, 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. edisi kedua. Jakarta : Mitra Wicana Media.
- Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Handoko T.
- Syokrani dan Syahriani, 2008. *Implementasi otonomi daerah dalam perspektif Good Governance*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang peraturan daerah kota makassar nomor 7 tahun 2005 tentang *Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar*.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 2011 . *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta : Rineka Cipta.